

# **RINGKASAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN**

**PT. WUKIRASARI**

**PERIODE TAHUN 2022 - 2027**

Teluk Bintuni, Papua Barat



## I. TUJUAN PENGELOLAAN

Dalam melakukan pemanfaatan sumberdaya hutan, PT. Wukirasari memiliki tujuan memanfaatkan sumberdaya hutan alam produksi secara lestari dengan memperhatikan aspek kelestarian usaha, keseimbangan lingkungan dan sosial-budaya, secara rasional dan terukur.

Dalam mengelola hutannya, PT. Wukirasari memiliki visi sebagai berikut:

***“Mewujudkan unit pemanfaatan hutan alam lestari yang layak usaha dan berdayaguna melalui penyelenggaraan pemanfaatan hutan alam yang menjamin kelestarian fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial berdasarkan prinsip pemanfaatan hutan alam lestari”.***

Sedangkan misi pengelolaan hutan PT. Wukirasari adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan hutan alam yang layak secara ekonomi menjalankan pengusahaan hutan dengan menerapkan sistem silvikultur yang tepat dan pemanenan hutan yang ramah lingkungan dan lestari.
2. Menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan hutan alam yang ramah lingkungan, seimbang dengan kegiatan pembinaan sumberdaya alam hayati dan lingkungannya.
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat adat dan distribusi manfaat secara adil dalam pemanfaatan hutan alam dengan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
4. Menerapkan secara konsisten prinsip pemanfaatan hutan alam lestari berdasarkan Standar Pengelolaan Hutan Lestari dan Standar Forest Stewardship Council (FSC).
5. Menerapkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dapat dilihat dalam matrik berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis Pengelolaan Hutan PT. Wukirasari Periode Tahun 2022 - 2027

No	Kegiatan	Sasaran
1.	Penilaian	
A.	Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)	Sebagai suatu unit manajemen, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam perlu mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan ( <i>standing stock</i> ) maupun dinamika yang terjadi di areal kerja dalam kurun waktu tertentu, baik karena penambahan maupun pengurangan vegetasi penyusunnya. Untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan ( <i>standing stock</i> ) dan dinamika yang terjadi di areal kerja dalam periode tertentu dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Prinsip pelaksanaan IHMB berbasiskan pada keragaman potensi dan hasil IHMB dapat digunakan sebagai dasar perhitungan <i>Annual Allowable Cut (AAC)</i> , yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan kayu.

B.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan di areal HPH secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap komponen lingkungan serat pola hubungannya dengan ekosistem. Perubahan-perubahan terhadap komponen hutan akibat pengusahaan hutan dapat berupa dampak positif maupun negative. Dalam rangka meningkatkan kemungkinan timbulnya dampak positif dan sekaligus menekan dampak negative dari kegiatan pengusahaan hutan dilaksanakan kegiatan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
C.	Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT)	<p>PT. Wukirasari berkomitmen untuk melakukan pengelolaan hutan alam yang berkelanjutan. Pengelolaan tersebut tidak hanya dari aspek produksi semata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan serta sosial-budaya yang ada di sekitarnya. Pengelolaan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan keharmonisan semua aspek <i>sustainable management</i> yang mencakup ekologi (lingkungan), produksi dan sosial-budaya. Salah satu instrument dalam pengelolaan hutan yang lestari adalah identifikasi nilai konservasi tinggi (NKT). Sasaran dari kegiatan identifikasi NKT diantaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi kawasan NKT di areal PBPH PT. Wukirasari dengan memperhatikan aspek-aspek fisik kawasan, keanekaragaman hayati, ekologi dan social budaya.</li> <li>- Melakukan analisis kondisi lanskap kawasan hutan yang ada dari aspek fisik kawasan, keanekaragaman hayati, ekologi dan social budaya serta menetapkan sebaran nilai-nilai konservasi.</li> <li>- Menghasilakn data dasar untuk pemetaan kawasan yang menunjukkan kawasan prioritas yang bernilai konservasi tinggi.</li> </ul>
D.	Penilaian Dampak Sosial berbasis Rapid Rural Appraisal	Dalam upaya melaksanakan tanggung jawab peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar areal konsesi, perusahaan harus memiliki startegi dalam menjamin kesejahteraan masyarakat ( <i>sustainable livelihoods</i> ). Strategi tersebut harus mempertimbangkan mengenai aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perusahaan dapat mengaplikasikan program yang relevan terkait kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus kondisi masyarakat setempat, serta penerimaan masyarakat terhadap program kelola sosial dan opsional perusahaan, maka dilakukan kajian dampak sosial ( <i>Social Impact Assessment</i> - SIA). Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan

		<p>pendekatan penilaian pedesaan secara cepat (<i>Rapid Rural Appraisal – RRA</i>)</p> <p>Adapun sasaran dari kegiatan tersebut diantaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi hak kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan tanah (tenurial) atau hak dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.</li> <li>- Mengidentifikasi isu social, dampak sosial, potensi dampak, baik dampak positif maupun dampak negative, yang terjadi di masyarakat,</li> <li>- Mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi perusahaan untuk menjalin hubungan sosial dengan masyarakat.</li> <li>- Mengkaji dan menganalisis dampak sosial internal perusahaan dalam pemenuhan hak-hak pekerja.</li> </ul>
<b>2.</b>	Program Pengelolaan	
A.	Penataan Areal Kerja	
a.	Zonasi Areal Kerja	<p>Terwujudnya pembagian zona kerja di kawasan hutan produksi seluas 116.320 Ha, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal Efektif untuk produksi seluas 95.397,29 Ha, terdiri dari areal berhutan seluas 90.297,29 Ha, areal non hutan seluas 4.500 Ha dan peruntukan PUP seluas 600 Ha</li> <li>- Kawasan Lindung seluas 19.482,71 Ha</li> <li>- Areal tidak efektif untuk unit produksi seluas 1.440 Ha</li> </ul>
b.	Tata Batas Areal Kerja dan Pemetaan	<p>Terselesaikannya kegiatan penataan batas areal kerja dan pemetaan dengan volume pekerjaan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total panjang batas 366.013 m</li> <li>- Realisasi tata batas 304.484 m</li> <li>- Rencana tata batas 61.529 m</li> </ul> <p>Hasil tata batas telah dipetakan sepanjang 304.484 m, yang selanjutnya dilakukan kegiatan rekonstruksi atau pemeliharaan batas berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rintisan batas dan pal batas</li> <li>- Pemberian cat baru dan penomoran pada pal batas yang kurang jelas</li> <li>- Penggantian pal batas yang rusak</li> </ul>
c.	Penataan Areal Kerja (PAK)	<p>Tertatanya areal kerja sesuai rencana PAK 2018 – 2027 seluas 30.10 Ha.</p> <p>Hasil penataan areal kerja di lapangan kemudian dipetakan ke dalam peta areal kerja sebagai acuan bagi pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan serta acuan bagi pimpinan untuk mengontrol dan mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan di lapangan.</p>
B.	Inventarisasi Tegakan	Terlaksananya kegiatan inventarisasi tegakan sebelum

		<p>penebangan (ITSP) tahun 2018 – 2027 seluas 30.10 Ha. ITSP dilaksanakan setiap tahun sebagai dasar penyusunan RKT dengan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku, yakni dengan mencatat jenis pohon, diameter setinggi dada (dbh), tinggi bebas cabang, memasang nomor pohon yang akan ditebang dan memberi tanda pada pohon yang dilindungi.</p>
C.	Pembukaan Wilayah Hutan	<p>Terlaksananya pembuatan jalan dengan total 846,24 km, terdiri dari jalan utama 279,26 km dan cabang 566,98 km. Dalam kegiatan pembukaan wilayah hutan memegang prinsip: efisien, efektif, tertib dan ramah lingkungan. Rencana PWH dibuat berdasarkan peta blok RKT. Rencana trase jalan angkutan dan jalan sarad dibuat berdasarkan peta kontur Hasil ITSP.</p>
D.	Penebangan	<p>Terlaksananya penebangan selama 10 tahun :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas : 30.100 Ha, rata-rata pertahun 3.010 Ha</li> <li>- Volume : 1.424.963,4 m<sup>3</sup>, rata rata pertahun 142.496,34 m<sup>3</sup></li> </ul> <p>Penetapan jatah produksi tahunan (JPT) didasarkan atas hasil IHMB. Pada pelaksanaannya luas dan volume nilainya fluktuatif tetapi diusahakan untuk tetap berada pada kisaran etat yang telah ditetapkan. Prioritas urutan tebangan dilakukan dengan memperhatikan kondisi hutan, yaitu sediaan tegakan rata-rata per hektar, kekompakan potensi petak tebang dan aksesibilitas. Pemungutan hasil hutan dilakukan dengan sistem tebang pilih dengan batasan limit diameter.</p>
E.	Pengadaan Bibit	<p>Tersedianya kebutuhan bibit jenis unggulan setempat untuk kegiatan penanaman pengayaan, rehabilitasi, penanaman kanan kiri jalan, tanah kosong sebanyak 8.368.899 batang.</p>
F.	Penanaman	<p>Penanaman bekas tebangan periode tahun 2018 - 2027, dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengayaan/rehabilitasi : 2.629 Ha</li> <li>- Penanaman kanan-kiri jalan : 280 Ha</li> <li>- Penanaman tanah kosong : 4.050 Ha</li> </ul> <p>Jenis tanaman yang dikembangkan adalah jenis-jenis komersil yang ditebang. PT. Wukirasari menerapkan teknik silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada seluruh areal efektif untuk produksi.</p>
G.	Pemeliharaan tanaman	<p>Terpeliharanya tanaman hasil penanaman, dengan perincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan tanaman I : 6.959 Ha</li> <li>- Pemeliharaan tanaman II : 6.116 Ha</li> <li>- Pemeliharaan tanaman III : 5.251 Ha</li> </ul>

H.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<p>Pengamanan dan perlindungan hutan dari gangguan kebakaran hutan, perambahan atau pemukiman illegal, penebangan kayu illegal, perburuan termasuk penjeratan dan pemancingan satwa dilindungi, kritis dan terancam punah pada seluruh areal.</p> <p>Perlindungan dan pengamanan hutan berkolaborasi dengan masyarakat adat dengan membangun posko kolaborasi yang ditempatkan pada lokasi akses keluar-masuk areal konsesi.</p>
I.	Penjualan dan Pemasaran Hasil	<p>Penjualan kayu log hasil produksi setiap RKT, dengan rencana produksi tahun 2018-2027 sebesar 1.424.963,4 m<sup>3</sup>.</p>
J.	Ketenagakerjaan	<p>Mendayagunakan tenaga kerja yang ada seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan.</p> <p>Mengadakan training untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja.</p> <p>Melengkapi tenaga kerja dengan APD sesuai kebutuhan di tempat kerja, sarana-prasarana kesehatan dan penerapan sistem manajemen K3.</p> <p>Menyediakan fasilitas untuk tenaga kerja berupa tempat tinggal, tempat ibadah, sarana olah raga.</p> <p>Memberi kebebasan kepada tenaga kerja untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi pekerja.</p> <p>Menerapkan sistem yang sesuai dengan konvensi buruh ILO yang telah diratifikasi pemerintah dan mendukung kesetaraan gender, mencegah diskriminasi gender</p>
K.	Kelola Sosial	<p>Lokasi kampung pemilik ulayat terdampak meliputi: Maskur, Kensi, Erigara, Pigo/Sawai, Taner/Refideso, Naramasa/Obo, Sarbey, Wagura/Otemtra.</p> <p>Untuk memperjelas kepemilikan hak ulayat atas hutan, dilakukan pemetaan batas-batas hak ulayat secara partisipatif dengan membuat batas-batas imajiner di peta, yang selanjutnya disepakati sebagai pedoman dalam pemberian kompensasi.</p> <p>Prioritas kegiatan: kompensasi atas hasil hutan dan sumber daya hutan lainnya, kesempatan kerja dan pengembangan usaha masyarakat, pendidikan dan kesehatan serta dukungan sarana-prasarana kampung.</p>
L.	Penelitian dan Pengembangan	<p>Penelitian riap jenis-jenis pohon komersil.</p> <p>Penelitian aspek ekologis suatu kawasan tegakan serta pengaruh struktur dan komposisi tegakan pada kawasan yang memiliki kondisi ekologis tertentu dan perannya dalam penentuan jatah tebang yang lebih baik dan ekonomis.</p> <p>Penelitian pemuliaan pohon tanaman jenis komersil.</p> <p>Penelitian penggunaan jenis-jenis yang belum dikenal dalam perdagangan untuk mendukung industry pengolahan kayu.</p>

		Penelitian terkait sosial dan ekonomi masyarakat untuk mendapatkan sistem manajemen masyarakat yang mampu meningkatkan daya dukung masyarakat.
M.	Pendidikan dan Pelatihan	<p>Pelatihan standar pengelolaan hutan lestari (PHPL dan FSC).</p> <p>Pelatihan Tenaga Teknis (Ganis) Perencanaan, Kurpet, Binhut, Pemanenan, PKBRI.</p> <p>Pelatihan <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL).</p> <p>Pelatihan Pengenalan Jenis Pohon.</p> <p>Pelatihan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.</p> <p>Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>Pelatihan Resolusi Konflik.</p> <p>Pelatihan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <p>Pelatihan Penanganan Limbah Berbahaya dan Beracun.</p>
N.	Pengadaan Sarana - Prasarana	Pemeliharaan base camp, camp kerja, perumahan karyawan, tempat ibadah, klinik kesehatan, sarana olah raga.
O.	Pengelolaan Kawasan Lindung dan Nilai-nilai Konservasi Tinggi (NKT)	<p>PT. Wukirasari telah menetapkan kawasan hutan seluas 19.482,71 Ha yang akan dikelola sebagai kawasan lindung, diantaranya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sempadan Sungai seluas 2.151,22 Ha.</li> <li>- Hutan Lindung dan Hutan Lindung seluas 6.846,46 Ha</li> <li>- Cagar Alam dan Bufferzone seluas 1.507,53 Ha</li> <li>- KPPN seluas 1.045,43 Ha</li> <li>- Kelas lereng E seluas 210,00 Ha</li> <li>- Karst seluas 1.370,00 Ha</li> <li>- IFL seluas 5.310,16 Ha</li> <li>- Mangrove seluas 223 Ha</li> <li>- Rawa Gambut seluas 511,18 Ha</li> <li>- Sempadan Mata Air seluas 46,35 Ha</li> <li>- Kebun Sagu seluas 2,35 Ha</li> <li>- Areal Keramat seluas 258,25 Ha</li> <li>- Kampung Lama seluas 0,78 Ha</li> </ul> <p>Kawasan lindung tersebut diantaranya merupakan hasil identifikasi nilai konservasi tinggi di areal konsesi PT. Wukirasari, dimana teridentifikasi adanya NKT1.1., NKT1.2, NKT1.3, NKT1.4, NKT2.1, NKT2.2, NKT2.3, NKT3, NKT4.1, NKT4.2, NKT4.3, NKT5 dan NKT6. Sebagian besar NKT yang termasuk dalam kategori kawasan dilindungi sudah termasuk dalam pencadangan kawasan lindung. Adapun beberapa lokasi yang belum masuk, secara mikro akan dimasukkan dan dikelola sebagai kawasan yang dilindungi. Perlindungan kawasan tersebut merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian perusahaan dalam pengelolaan hutan sehingga kelestarian keanekaragaman dan fungsi hutan tetap dapat dipertahankan, diantaranya sebagai pengatur tata air, pengendali iklim mikro, habitat kehidupan liar, perlindungan flora-fauna langka dan terancam, sumber</p>

		plasma nutfah serta fungsi sosial budaya masyarakat sekitar.
P.	Pengelolaan Konservasi Tanah dan Air	<p>Terlaksananya kegiatan pengelolaan konservasi tanah dan air melalui kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman pada lahan kosong, kanan-kiri jalan, bekas TPn/TPK Hutan, bekas jalan sarad.</li> <li>- Pembuatan bangunan konservasi seperti: terasering pada lahan miring, pemasangan pancang pada tepi jurang.</li> <li>- Pembuatan sodetan pada bekas jalan sarad.</li> <li>- Pembuatan sedimen trap pada kanan-kiri jalan.</li> <li>- Pembuatan jembatan dan gorong-gorong pada jalan yang melewati badan air.</li> </ul>
<b>3.</b>	Program Pemantauan	
A.	Pertumbuhan dan Dinamika Ekosistem Hutan	Terlaksananya kegiatan pengamatan pertumbuhan tanaman melalui pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) dan Sample Plot Permanen (PSP).
B.	Kawasan Lindung dan NKT	Terlaksananya kegiatan pemantauan kawasan lindung dan NKT melalui kegiatan patroli rutin, pemantauan tutupan lahan di kawasan lindung dan NKT, identifikasi flora-fauna.
C.	Dampak Lingkungan	<p>Terlaksananya kegiatan pemantauan lingkungan untuk menanggulangi dampak negative penting.</p> <p>Pemantauan dilaksanakan terhadap komponen dampak dan sumber dampak, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laju erosi</li> <li>- Sedimentasi</li> <li>- Kualitas air</li> <li>- Struktur dan potensi tegakan</li> <li>- Habitat satwa liar</li> <li>- Keragaman flora-fauna.</li> <li>- Sosial budaya masyarakat.</li> </ul>

## II. PENILAIAN SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Manajemen PT. Wukirasari memiliki komitmen dalam mengelola sumberdaya hutan yang menjadi tanggungjawabnya menuju pada pengelolaan yang bertanggungjawab dan lestari, sesuai dengan misi dan visi perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan tersebut, PT. Wukirasari telah melakukan identifikasi dan penilaian beberapa aspek, antara lain:

### A. Sumber Daya Alam dan Nilai-nilai lingkungan

#### 1. Dokumen Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB),

Dalam dokumen tersebut merupakan hasil dari survey pengumpulan data potensi awal kondisi sediaan tegakan hutan yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh tahun) di dalam hutan produksi (hutan alam), untuk periode tahun 2018 – 2027.



Berdasarkan hasil IHMB diketahui bahwa rata-rata sediaan tegakan (*standing stock*) per hektar untuk jenis komersial kelas dalam jumlah yang cukup. PT. Wukirasari memiliki *standing stock* hingga 30 tahun (2018 – 2047) sebesar 10.288.741,18 m<sup>3</sup> (khusus diameter 40 cm up pohon komersil). Dimana kelompok jenis pohon komersial yang akan di panen terdiri dari Kelompok Kayu Meranti, Kelompok Rimba Campuran dan kelompok Kayu Indah. Gambaran kondisi sediaan tegakan jenis komersial setiap kelas diameternya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Rata-Rata Sediaan Tegakan (*Standing Stock*) Jenis Komersil Setiap Kelas Diameter Berdasarkan Hasil IHMB di PT. Wukirasari

No.	Jenis/ Kelompok Jenis	Rata-rata Jumlah Batang (Btg/Ha) dan Volume (m <sup>3</sup> /Ha)										
		10-<20 cm			20- <30 cm		30- <40 cm		40 cm up		50 cm up	
		N	N	V	N	V	N	V	N	V		
1	Kayu Indah	7,95	0,85	0,32	0,62	0,53	1,74	3,49	1,18	2,97		
2	Kayu Meranti	29,67	8,25	2,80	6,73	5,31	14,73	33,01	8,68	27,76		
3	Rimba Campuran	229,09	49,28	16,08	33,61	25,39	49,93	77,97	19,69	53,81		
<b>Total</b>		<b>267,09</b>	<b>58,38</b>	<b>19,20</b>	<b>40,96</b>	<b>31,23</b>	<b>66,39</b>	<b>114,48</b>	<b>29,55</b>	<b>84,54</b>		

Sumber : Rekapitulasi Hasil IHMB Tahun 2017-2018

## 2. Laporan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP),

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) merupakan kegiatan dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia yang meliputi kegiatan pengukuran pencatatan dan penandaan pohon dalam blok kerja tahunan dengan tujuan supaya jenis, jumlah, diameter dan tinggi pohon tebang, koordinat pohon, pohon dilindungi, pohon inti dan bentang alam, keberadaan alur serta kawasan yang dilindungi atau bernilai konservasi tinggi dapat diketahui.

ITSP yang dilakukan dua tahun sebelum kegiatan penebangan, juga bermaksud untuk mengetahui data yang dibutuhkan dalam menetapkan target produksi tahunan. Dari hasil kegiatan ITSP di areal kerja PT. Wukirasari didapatkan sebanyak kurang-lebih 30 jenis kayu komersil yang terbagi dalam kelompok kayu meranti, kayu rimba campuran dan kayu Indah. Diantara jenis kayu yang familiar dijumpai adalah merbau, matoa, mersawa, nyatoh, benuang, bipa, jabon, jambu-jambuan, medang, dan masih banyak jenis lainnya dengan tingkat kekerasan kayu yang sangat beragam.

## 3. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),

Merupakan dokumen induk sebagai persyaratan dan komitmen PBPH untuk kegiatan pengolahan hasil hutan skala usaha menengah/besar yang berdampak merusak bentang alam dan/atau berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Hasil akhir dari kegiatan studi AMDAL adalah dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dengan dokumen AMDAL.

Hasil prakiraan dampak pada tahap pelaksanaan kegiatan mengindikasikan adanya perubahan pada beberapa parameter lingkungan fisik-kimia, biologi maupun social ekonomi dan budaya masyarakat, baik pada tingkat tidak penting maupun penting, positif maupun negative. Parameter lingkungan fisik-kimia dimaksud, diantaranya adalah fisik tanah, kimia tanah, erosi tanah, debit air, sedimentasi, kualitas air. Parameter lingkungan biologi diantaranya adalah potensi hutan, struktur tegakan, indeks keragaman, habitat satwa, komposisi jenis satwa dan biota air. Sedangkan parameter lingkungan sosekbud diantaranya adalah keterbukaan wilayah, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat dan persepsi masyarakat.

Berdasarkan proporsi jenis komersil yang relative besar dengan kekayaan jenis yang sangat tinggi serta keadaan pohon inti yang masih dalam keadaan sehat, maka kelestarian fungsi produksi hutan di wilayah kerja PBPH PT. Wukirasari masih terjamin karena perubahan yang terjadi tergolong kecil. Dengan perkataan lain, dampak terhadap kelestarian fungsi produksi hutan tergolong negative tidak penting.

Adanya rencana penyisihan sebagian hutan sebagai kawasan lindung, termasuk komitmen dalam pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi, jelas akan memerankan fungsi sebagai game refuge bagi jenis-jenis burung spesifik. Dengan demikian penurunan kualitas habitat sebagai akibat kegiatan perusahaan hutan oleh PBPH PT. Wukirasari, khususnya kegiatan penebangan, hanya sekedar menggeser penyebaran populasi, tetapi tidak akan mengancam keberadaan jenis satwaliar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dampak perusahaan hutan pada kelestarian fungsi lingkungan tergolong dampak negative tidak penting.

Dalam pelaksanaan operasional di lapangan PT. Wukirasari sangat menghormati dan mengakui keberadaan kepemilikan hak ulayat masyarakat adat yang ada di sekitarnya. Disamping memberikan kompensasi atas kepemilikan hak ulayat, juga melaksanakan program pemberdayaan masyarakat diantaranya bantuan fasilitas sosial, peluang kerja. Hadirnya PT. Wukirasari akan membuka peluang berusaha bagi masyarakat akibat adanya keterbukaan wilayah, potensi munculnya pusat-pusat perekonomian dan pusta-pusat pertumbuhan daerah. Dengan demikian menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan perusahaan hutan oleh PT. Wukirasari berdampak positif penting.

Penanggulangan dampak penting dimaksudkan untuk menekan dampak negative dan mengembangkan dampak positif, diantaranya adalah dengan pendekatan teknologi, seperti penerapan pemanenan ramah lingkungan (*Reduce Impact Logging*), teknik penebangan, rancangan jalan sarad dan kualitas jalan angkutan, menjaga kapasitas saluran drainasi, pengendali aliran permukaan, bangunan pengendali erosi, dan lain-lain. Dismaping itu juga melalui pendekatan social ekonomi, diantaranya pembinaan masyarakat, bantuan fasilitas umum, membuka kesempatan bekerja dan berusaha, tidak menutup akses masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan lain-lain.

#### **4. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan.**

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) menjadi dasar rumusan arah pengelolaan bagaimana PBPH akan melakukan pengelolaan karena memuat upaya pencegahan, pengendalian, dan pengendalian dampak penting negatif dan upaya peningkatan dampak penting positif yang timbul sebagai akibat rencana kegiatan perusahaan hutan. Kegiatan RKL PBPH PT. Wukirasari diantaranya adalah ditujukan untuk mengelola dampak pada komponen lingkungan fisik-kimia, seperti tanah, dampak pada komponen biologi, seperti vegetasi hutan dan satwa liar, serta dampak pada komponen social ekonomi dan social budaya, seperti kesempatan berurusan, kesempatan kerja dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan serta sikap masyarakat terhadap PBPH PT. Wukirasari.

Sedangkan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) merupakan perangkat kontrol terhadap hasil dan implementasi studi AMDAL, kegiatan pengelolaan lingkungan akan dipantau berdasarkan arahan, prinsip dan prosedur yang tertuang di dalam dokumen ini. Hasil dari kegiatan pemantauan akan menjadi bahan evaluasi serta menjadi dasar menentukan langkah-langkah operasional pengelolaan lingkungan selanjutnya. Kegiatan RPL PBPH PT. Wukirasari diantaranya adalah pada komponen lingkungan fisik-kimia, seperti erosi tanah, kualitas air sungai akibat pembukaan wilayah hutan dan penebangan, komponen lingkungan biologi,

seperti pengurangan mutu habitat satwa liar dan keragaman hayati akibat penebangan, serta komponen sosekbud, seperti konflik sosial.

#### **5. Dokumen Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT)**

Merupakan salah satu instrumen dalam pengelolaan hutan lestari. Hasil identifikasi NKT menjadi rancangan yang membantu PBPH dalam mengelola hutan dalam usaha peningkatan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hasil akhir dari kegiatan identifikasi NKT adalah rekomendasi yang diharapkan menjadi dasar dalam pengelolaan dan pemantauan NKT yang teridentifikasi.

Kajian Nilai Konservasi Tinggi di PT. Wukirasari mendapatkan hasil bahwa secara keseluruhan di areal PBPH PT. Wukirasari teridentifikasi adanya areal bernilai konservasi tinggi meliputi NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4, NKT 5 dan NKT 6, walaupun beberapa masih bersifat indikatif. Areal yang teridentifikasi memiliki NKT, tidak seluruhnya masuk dalam kategori dilindungi, namun terdapat beberapa areal yang masih dapat dilakukan kegiatan produksi dengan penerapan prinsip kehati-hatian, sistem RIL ataupun yang lain yang masih menyisakan tegakan. Hal ini memungkinkan areal NKT untuk dilakukan pemanfaatan asal tidak menghilangkan dari fungsi dan atribut NKT. Adapun areal NKT yang masuk dalam kategori dilindungi diantaranya adalah hutan lindung dan bufferzone, cagar alam dan bufferzone, sempadan sungai dan bufferzone, sumber mata air dan bufferzone, IFL, KPPN, karst, mangrove, rawa gambut, kebun sagu, areal keramat dan kampung lama.

Berdasarkan hasil identifikasi data sekunder dan beberapa temuan lapangan, di areal konsesi PBPH PT. Wukirasari terdapat spesies endemic dan RTE (*rare, threatened or endangered*), diantaranya 29 jenis burung, 3 jenis mamalia, 3 jenis herpetofauna dan 49 spesies tumbuhan. Tidak terdapat satwa yang termasuk dalam kategori kritis berdasarkan IUCN. Terhadap satwa liar tersebut dilakukan pemantauan keberadaannya secara berkala, disamping berusaha untuk meningkatkan kualitas habitat satwa liar tersebut dengan menjaga Kawasan lindung dan melakukan penanaman pohon di area-area terbuka.

#### **B. Sumberdaya dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya**

Persyaratan dan standar pengelolaan hutan produksi yang terus berkembang mendorong PT Wukirasari untuk terus berbenah. Tidak hanya fokus pada fungsi produksi namun juga berusaha untuk memenuhi setiap aspek yang berkaitan dengan pengelolaan yang berkelanjutan, dalam hal ini juga menyangkut kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar konsesi yang terdampak kegiatan operasional baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka meningkatkan kualitas data PT Wukirasari melakukan sebuah kajian terkait Penilaian Dampak Sosial (*Social Impact Assessment*) berbasis Rapid Rural Appraisal (RRA). Hasil kajian tersebut menghasilkan gambaran lebih dalam untuk merumuskan rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak sosial yang ditimbulkan serta memberikan masukan kepada perusahaan agar pengembangan masyarakat sebagai bagian dari CSR yang akan dikembangkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta sebagai bagian dari mitigasi dampak sosial. Berikut adalah daftar kampung yang terdapat di dalam dan disekitar PT Wukirasari:

Kampung	Distrik	Kabupaten	Lokasi Terhadap Konsesi	
			Dalam Areal	Sebagian di Dalam
ERGARA	TELUK ARGUNI	KAIMANA		√
KENSI	TELUK ARGUNI			√
MASKUR	TELUK ARGUNI			√
PIGO	KURI		√	
SERBEI	KURI	TELUK BINTUNI		√
NARAMASA	KURI			√
WAGURA	KURI		√	
TANER/REFIDESO	KURI		√	
AWEGRO	KURI			√
OTEMTRA	KURI			√

Berdasarkan lokasi kampung yang terdapat di dalam areal PT Wukirasari terdapat 3 (tiga) kampung, sedangkan 7 (tujuh) sisanya adalah sebagian terletak di dalam PT Wukirasari. Lokasi kampung ini juga diduga akan mempengaruhi interaksi yang timbul antara masyarakat dengan keberadaan PBPH yang mana dari 10 kampung 2 (dua) diantaranya menunjukkan bentuk interaksi yang kurang intensif (√), sedangkan 8 (delapan) sisanya intensif (√). Bentuk interaksi masyarakat dengan PT Wukirasari antara lain : Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (Memangkur sagu, mencari getah pohon/kayu, berburu dan mencari obat), Pemanfaatan sumber daya air (Mencari ikan, MCK, air minum) dan pemanfaatan sumber daya lahan (berkebun/berladang).

Mata pencaharian masyarakat juga erat berkaitan dengan sumber daya alam khususnya hutan di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Mayoritas mata pencaharian yang memiliki kemiripan antar kampung yaitu kebiasaan mencari kayu/kulit kayu untuk dijual ke pengepul atau diproses sendiri untuk di ekstrak minyak atsirinya. Adapun aktivitas lainnya yaitu berburu, mencari ikan, berkebun/berladang (pisang, singkong betatas, jagung, keladi, pinang, rambutan, durian dll) untuk konsumsi sendiri ketika berlebih baru dijual, dibarter dengan tetangga atau sekedar dibagikan kepada tetangga. Hasil pemungutan HHBK akan dikumpulkan untuk dijual ke luar kampung seperti kulit kayu masohi, lawang, damar, pala dan gaharu. Selain itu terdapat profesi masyarakat yang cukup menarik yaitu berburu buaya untuk dijual kulitnya, perburuan buaya akan dilakukan ketika ada pesanan saja.

Sarana dan prasarana ekonomi masyarakat di sekitar kampung masih sangat sulit, oleh karenanya masyarakat lebih sering mengkonsumsi hasil pertaniannya sendiri. Dari kondisi yang demikian PT Wukirasari mencoba untuk memfasilitasi jual beli masyarakat dengan cara memfasilitasi pasar dan membeli sebagian besar hasil bumi masyarakat sisanya seperti buah-buahan dibeli oleh karyawan/ti. Dari hal ini diharapkan untuk kedepannya akan semakin meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

### C. Risiko Sosial dan Lingkungan Utama di Kawasan

Analisis risiko berdasarkan hasil kajian ditemukan beberapa isu yang mempunyai tingkat risiko dari yang rendah sampai tinggi/penting. Dalam rangka usaha memetakan risiko tersebut PT Wukirasari telah membuat beberapa kajian antara lain :

- Kajian AMDAL
- Laporan Identifikasi NKT
- Kajian PRA-SIA
- Peta sebaran ulayat

- Laporan Monitoring SIA
- Laporan pemetaan konflik
- Laporan register isu sosial
- Laporan tingkat bahaya erosi
- Laporan kualitas air sungai

Analisa berdasarkan isu dan dampak sosial yang perlu mendapatkan perhatian adalah: perladangan, SDM rendah, minimnya pendidikan luar sekolah, sungai keruh, kesehatan anak dan buruknya sarana penerangan kampung. Oleh karenanya PT Wukirasari akan senantiasa berusaha untuk menyelesaikan masalah isu sosial tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di dalam dan disekitar areal konsesi.

Setiap kegiatan yang berisi tentang rencana pengelolaan sosial dan lingkungan terangkum dalam Rencana Operasional (RO) perusahaan, sedangkan laporan resolusi konflik menurut p.5 yang mana sekarang mengikuti peraturan terbaru yaitu Permen LHK no.8 tahun 2021 yang dilaporkan setiap semester kepada Dinas Kehutanan, BPHP dan Dirjen PHL.

Adapun hasil dari kegiatan penilaian dampak sosial adanya kegiatan pengelolaan hutan berbasis *Rapid Rural Appraisal (RRA)* di semua desa-desa yang berada disekitar kawasan konsesi adalah :

- Isu sosial di sekitar areal PBPH PT. Wukirasari yang perlu mendapatkan perhatian adalah isu-isu strategis berkaitan dengan Perladangan, SDM Rendah, Minim Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Sungai Keruh, Kesehatan Anak, dan isu Buruknya Sarana Penerangan Kampung.
- Dampak positif hadirnya PT. Wukirasari yang sangat dirasakan warga kampung adalah berkaitan dampak bantuan BBM untuk masyarakat, terbukanya akses jalan dan jembatan, bantuan material, jasa transportasi, beasiswa, tenaga kerja, pelayanan kesehatan, kompensasi pengambilan kayu dan sewa lahan.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut maka PT. Wukirasari menyusun rencana pengelolaan bagi kegiatan operasional lapangan yang akan menjadi acuan dalam bekerja bagi staff di lapangan, khususnya untuk memenuhi standar pengelolaan hutan FSC (*Forest Stewardship Council*), yang dituangkan dalam rencana operasi Kelola sosial.

#### **D. Jasa Ekosistem**

Untuk pengembangan jasa ekosistem, PT. Wukirasari melakukan identifikasi potensi hasil hutan kayu bukan kayu yang ada di area konsesi PBPH PT. Wukirasari yang telah dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari hasil identifikasi terdapat potensi hasil hutan bukan kayu berupa gaharu, masohi, kayu lawang, pala, sagu. Komoditi tersebut sudah terbiasa diusahakan oleh masyarakat dengan mengumpulkan dari hutan. Untuk menjaga kelestarian produksi komoditi tersebut, terutama untuk komoditi masohi dan kayu lawang, PT. Wukirasari memberikan bantuan bibit masohi dan kayu lawang kepada masyarakat untuk dikembangkan. Disamping itu jasa lingkungan yang cukup potensi di area konsesi PBPH PT. Wukirasari adalah karbon tersimpan.

### III. PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. Hak-Hak Pekerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesetaraan Gender

Hak-hak pekerja meliputi sistem pengupahan, tunjangan dan hari libur, jaminan sosial, sarana prasarana, pelatihan karyawan diatur dan dijelaskan di dalam peraturan perusahaan. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 tahun sekali dan disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Program kerja dan kegiatan K3 direncanakan dalam Tusapro (Tujuan Sasaran Program) yang disusun secara tahunan. Program kerja serta kegiatan K3 di implementasikan dalam suatu Sistem Manajemen K3 dan dibentuk Panitia P2K3 sebagai perangkat SDM (Sumber Daya Manusia) penerapan sistem Manajemen K3. Kegiatan P2K3 yang dilakukan meliputi *safety induksi* untuk karyawan baru, *safety talk*, *safety patrol* untuk seluruh karyawan di lingkungan PT Wukirasari, pemasangan spanduk K3, pemasangan rambu-rambu dan pembatas jalan serta monitoring kotak P3K dan APAR. Seluruh kegiatan K3 dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap seluruh karyawan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat tercapai tanpa adanya fatality akibat kecelakaan. Laporan P2K3 dilaporkan kepada Dinas DPMPSTP dan Tenaga Kerja dan Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Implementasi kesetaraan gender diterapkan dalam proses perekrutan, pengupahan, pelatihan dan terutama partisipasi perempuan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan manajemen dan LKS Bipartit. Program dan kegiatan sosialisasi kesetaraan gender sekaligus sosialisasi mekanisme penerapannya dilakukan secara tahunan. Sebagai bentuk komitmen, Management PT Wukirasari juga menuangkan dalam kebijakan tertulis terkait Anti Diskriminatif dan Anti Pelecehan Seksual yang mana menjamin seluruh karyawan untuk bekerja tanpa adanya diskriminasi dan pelecehan sehingga kenyamanan dan keamanan dalam bekerja dapat dirasakan oleh semua pihak.

#### B. Masyarakat Adat, Hubungan Masyarakat, Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Setempat

Kehadiran dan beroperasinya PT Wukirasari turut memberikan interaksi positif maupun interaksi yang negatif. Dampak yang timbul dari hubungan PT Wukirasari dan masyarakat termasuk perubahan serta motivasi masyarakat yang seiring waktu berubah atas cara pandang terhadap perusahaan. Disisi lain rencana kelola sosial juga turut berubah secara dinamis mengikuti cara hidup masyarakat, budaya, sistem politik, lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan, hak-hak pribadi dan hak milik serta aspirasi masyarakat. Mengikuti perubahan tersebut PT Wukirasari telah merencanakan pengelolaan sosial yang terangkum dalam Rencana Operasional (RO). Jenis kegiatan yang direncanakan meliputi :

- Aspek penghargaan hak adat dan penyelesaian konflik
- Aspek penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat
- Aspek bantuan prasarana umum
- Aspek pelayanan pendidikan dan sosial budaya
- Aspek operasional dan pengembangan

### C. Keterlibatan Pemangku kepentingan dan Penyelesaian Perselisihan dan Keluhan

Program Kelola Sosial menjadi salah satu aspek yang penting dalam operasional PT. Wukirasari karena dalam perjalanannya seluruh kegiatan operasional melibatkan masyarakat dan budayanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Melalui pelibatan masyarakat adat yang sesuai dengan budayanya diharapkan akan meminimalisir adanya konflik antara kedua belah pihak sehingga manfaat hutan dapat di rasakan oleh kedua belah pihak (PBPH-Masyarakat). Mengingat hutan yang menjadi areal konsesi PT Wukirasari adalah hutan yang dibebani hak/hutan hak maka PT Wukirasari telah merencanakan dan merealisasikan kajian *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) untuk memastikan informasi dari masyarakat khususnya para pemangku kepentingan untuk menyetujui atau tidak menyetujui penguasaan lahan/tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka oleh adanya PT Wukirasari. Secara lebih rinci keterlibatan pemangku kepentingan dan penyelesaian konflik telah direncanakan dan direalisasikan pada kegiatan dibawah ini:

- SINARA Tahunan
- Pemetaan Konflik
- Tata Batas Kolaboratif
- Kompensasi Hak Ulayat
- Penyelesaian Perselisihan
- Penyelesaian Denda

Keluhan serta penyelesaian keluhan tidak terbatas pada masyarakat adat namun juga kepada karyawan/ti. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan dan keluhan karyawan diakomodir dalam Prosedur Keluhan, Kritik, Saran, Pengaduan dan Perselisihan Karyawan, serta Lembaga Kerjasama BIPARTIT.

### D. Kegiatan dan Jadwal Pengelolaan, Sistem Silvikultur, Meode dan Peralatan Pemanenan

#### 1. Sistem Silvikultur yang Diadopsi PT Wukirasari

Berdasarkan kondisi topografi yang ada PT Wukirasari mengadopsi Sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) yang lebih mampu mengakomodir kondisi hutan alam dengan kondisi medan dengan topografi sedang hingga berat. Unit manajemen juga menerapkan Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) yang diterapkan untuk penanaman pengayaan dengan pola rumpang, disisi lain juga menerapkan pola jalur sebagai uji coba.

#### 2. Kegiatan dan Jadwal Pengelolaan yang Direncanakan

Implementasi kegiatan dan jadwal pengelolaan secara umum dengan mengacu pada tahapan-tahapan TPTI serta RKTPH dan RKUPH sebagai berikut :

- Penataan Areal Kerja (PAK) ET-3
- Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) ET-2
- Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) ET-1
- Pemanenan ET
- Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan ET+1, ET+2
- Pembebasan pohon binaan ET+1
- Perlindungan dan Pengamanan Hutan (selama PBPH beroperasi)

#### 3. Metode dan peralatan pemanenan

PT. Wukirasari menerapkan metode pemanenan ramah lingkungan atau *Reduced Impact Logging* (RIL). Teknik pemanenan RIL yang dipilih adalah ground based skidding dengan menggunakan Bulldozer. Alat pemanenan lainnya dan supportingnya diantaranya chainsaw, excavator, dump truck, motor grader, wheel loader, truck tanki, logging truck.

#### **E. Dasar Tingkat Pemanenan Kayu**

PT Wukirasari telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) sepuluh tahun (2018-2027). PT Wukirasari juga telah melaksanakan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sebagai dasar penyusunan RKUPHHK-HA, IHMB dilaksanakan pada tahun 2018. Penentuan luas, lokasi dan urutan blok tebangan tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan data sediaan tegakan (standing stock) hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Dalam penentuannya berpegang pada prinsip dasar areal dengan sediaan tegakan yang lebih tinggi sedapat mungkin direncanakan dilakukan penebangan terlebih dahulu, dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan teknis dan ekonomis dalam pelaksanaan operasionalnya.

Penentuan jatah tebang tahunan PT Wukirasari masih berbasis pada IHMB dan belum berdasarkan riap yang dibuat dan diukur oleh manajemen PT Wukirasari mengingat data hasil pengukuran belum selesai dilakukan. Etat volume dihitung berdasarkan pada pembagian potensi sediaan tegakan dan daur. Adapun perhitungan etat volume disetiap fungsi kawasan hutan PT. Wukirasari adalah sebagai berikut :

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa Etat Volume di PT. Wukirasari adalah :  
= 203.566,21 m<sup>3</sup> / tahun.

Jatah Produksi Tahunan (JPT) untuk seluruh jenis sebesar :  
= 142.496,34 m<sup>3</sup>/tahun

Jatah Produksi Tahunan untuk jenis Merbau  
= 32.869,20 m<sup>3</sup>/tahun

### **IV. LANGKAH-LANGKAH PELESTARIAN**

#### **A. Habitat, Spesies Langka dan Terancam**

Upaya PT. Wukirasari dalam rangka menjaga habitat, spesies langka dan terancam dilakukan dengan cara melakukan identifikasi secara mandiri berdasarkan dokumen AMDAL maupun RKUPH. Selain itu PT Wukirasari juga melakukan kajian NKT untuk mengetahui mana saja areal yang termasuk habitat spesies langka dan terancam. Dari hasil identifikasi tersebut rekomendasi yang ada akan menjadi dasar bagi PBPH untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan. Dari hasil rumusan tersebut kemudian akan dituangkan pada strategi dan rencana aksi pengelolaan NKT yang telah dikonsultasikan kepada para pakar untuk dilaksanakan implementasinya oleh bagian dari organisasi yang berkaitan.

#### **B. Badan Air dan Sempadan Sungai**

Sungai dan sempadan sungai sangat penting dalam upaya pelestarian baik habitat satwa darat maupun akuatik, disisi lain juga sebagai NKT 4.1 kawasan penting yang menyediakan air dan pengendalian banjir untuk kebutuhan masyarakat di hilir. Pengelolaan badan air dan sempadan sungai di PT Wukirasari mengikuti ketentuan dari *Code of Practice ini Asia Pacific RAP Publications Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations Regional of for Asia and the Pacific. 1999, Bangkok, Thailand, P.8* Menlhk tahun 2021. Normalisasi aliran sungai pasca pembuatan jalan atau jembatan dan penanaman sempadan pasca pembuatan jembatan dilakukan untuk mengurangi efek negatif erosi dan sedimentasi pada badan air.

#### **C. Keterhubungan Lanskap Termasuk Koridor Satwa**

PT Wukirasari berkomitmen untuk tidak melakukan konversi lahan dan meminimalisir keterbukaan pada kegiatan operasionalnya sehingga keterhubungan lanskap dapat terjaga, termasuk perencanaan yang matang dan penerapan penebangan ramah lingkungan menjadi hal penting dalam meminimalisir keterbukaan wilayah dan melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi. Koridor satwa yang utama adalah keberadaan sungai dan sempadan sungai.



#### **D. Keterwakilan Kawasan**

Keterwakilan kawasan pada PBPH adalah dengan keberadaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai, Karst, Mangrove dan kawasan lindung lainnya. KPPN adalah suatu tipe kawasan pelestarian di dalam habitat aslinya (in situ) di kawasan hutan produksi untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah baik dari jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik (Kepmenhutbun No. 375/Kpts-II/1998). Kegiatan pengelolaannya adalah dengan melakukan tata batas dan pemasangan plang, sehingga dalam operasional produksi diharapkan tidak terdapat ancaman atau gangguan terhadap kawasan tersebut. Pemantauan dilakukan secara periodik untuk mengetahui kondisi dinamika keberadaan flora fauna di dalam area tersebut sesuai tata waktu berjalan.

#### **E. Jasa Lingkungan**

Untuk menjaga kelestarian produksi hasil hutan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar konsesi, PT Wukirasari berusaha mengembangkan hasil hutan bukan kayu berupa bantuan bibit masohi dan kayu lawang kepada masyarakat.

#### **F. Nilai Konservasi Tinggi**

PT. Wukirasari telah melakukan kajian identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dengan menggandeng pihak ke 3 (tiga). Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa PT Wukirasari memiliki seluruh atribut NKT. Setiap atribut NKT memiliki potensi ancaman masing-masing, sehingga bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berbeda pula disesuaikan dengan resiko ancaman yang akan timbul sekarang atau di kemudian hari. Bentuk pengelolaan dan pemantauan telah dirangkum dalam dokumen strategi dan rencana aksi pengelolaan dan pemantauan NKT. Untuk menjaga kelestarian fungsi dan meningkatkan nilai konservasi tinggi, PT. Wukirasari melakukan upaya perlindungan terhadap areal-areal yang bernilai konservasi tinggi, dengan menetapkan sebagai Kawasan lindung yang tidak boleh diganggu keberadaanya.

### **V. LANGKAH UNTUK MENILAI, MENCEGAH, DAN MENGURANGI DAMPAK NEGATIF**

#### **A. Nilai-Nilai Lingkungan**

Dampak negatif kegiatan pengelolaan terhadap nilai lingkungan diidentifikasi dan di dokumentasikan dalam Dokumen AMDAL, RKL/RPL. Implementasi upaya mitigasi di lapangan diatur sesuai tingkat dampak negatif yang ditimbulkan, tata waktu dan didokumentasikan dalam RO Lingkungan dan *Site Impact Assessment*. Pasca kegiatan produksi, operator memperlakukan mitigasi pada petak-petak tebang untuk mengurangi dampak negatif, melakukan monev RIL dan kegiatan rehabilitasi lahan pasca pemanenan untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap dampak lingkungan dapat dicegah dan diminimalisir. Kegiatan untuk mengurangi dampak lingkungan antara lain Patroli perlindungan dan pengamanan hutan, rehabilitasi lokasi yang terdegradasi seperti bekas TPN, Jalan Sarad, Ka-Ki Jalan, Ka-Ki Jembatan.

#### **B. Nilai Sosial**

Dampak negatif dari kegiatan pengelolaan terhadap nilai sosial diidentifikasi dalam dokumen AMDAL, RKL/RPL, SIA dan FPIC. Upaya mitigasi dilakukan sesuai dengan Mekanisme dan SOP secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan yang kompeten dan didokumentasikan dalam laporan dan RO Kelola Sosial.

## VI. RENCANA DAN KEGIATAN PROGRAM PEMANTAUAN

### A. Pertumbuhan dan Hasil

Pertumbuhan dan hasil di analisa berdasarkan kegiatan pengukuran dan perencanaan hasil produksi. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat petak pengamatan yaitu Plot Sampel Permanen (PSP) dan Petak Ukur Permanen (PUP). PSP dilakukan untuk mengetahui kondisi tegakan sebelum dan setelah penebangan, serta mengetahui adanya kerusakan tegakan pasca penebangan dan regenerasi hutan alam pulih Kembali secara bertahap. Sedangkan PUP digunakan untuk pemantauan riap di bekas tebangan, data akhir dari pemantauan riap di PUP ini adalah diketahuinya Current Annual Increment (CAI, m<sup>3</sup>/ha/tahun) dan Mean Annual Increment (MAI, m<sup>3</sup>/ha/tahun) sebagai dasar penentuan jatah tebang.

### B. Nilai-Nilai Lingkungan

#### 1. Air

Program pemantauan air meliputi pemantauan kualitas air untuk dikonsumsi serta kualitas air di beberapa lokasi sungai dan air laut yang terkena dampak operasional perusahaan. Pemantauan kualitas air dilakukan oleh unit manajemen secara periodik dan juga dilakukan Bersama pihak ketiga penguji lab kualitas air yang sudah terakreditasi. Parameter yang diuji meliputi, parameter fisika (pH, BOD, COD, TSS, dll), kimia.

#### 2. Tanah

Pemantauan terhadap tanah dilakukan dengan monitoring dan evaluasi terhadap lokasi bekas penebangan serta pemantauan erosi. Pemantauan erosi di PT. Wukirasari dilakukan dengan metode stik yang ditempatkan pada kelas lereng 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan >40%. Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali.

#### 3. Flora dan Fauna

Perencanaan untuk mengetahui kondisi flora dan fauna adalah dengan pengelolaan habitat serta pemantauan secara periodik. Pemantauan terhadap flora dan fauna dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pemantaua	Metode	Analisa Data
Flora	Analisa Vegetasi	Kerapatan Jenis Frekuensi Dominansi Indeks Nilai Penting (INP) Indeks Diversitas Shannon – Wiener (H')
Aves (Burung)	Point Count Kamera trap	N/Ha Indeks Diversitas Shannon – Wiener (H') Indeks Eveness (E)
Mamalia & Reptil	Transek Garis Kamera trap	N/Ha Indeks Diversitas Shannon – Wiener (H') Indeks Eveness (E)

#### 4. Kawasan Lindung

Upaya pemantauan kawasan lindung tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasannya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kawasan lindung, dinamika perubahan yang ada di dalamnya dan mencakup kondisi flora-fauna.

## **C. Dampak Operasional**

### **1. Sosial**

Kajian Sosial dan Monitoring Evaluasi dalam Pengembangan Kegiatan PT Wukirasari bersama masyarakat, meliputi :

- Kajian Rapid Rural Appraisal (RRA) pada masyarakat/kampung terdampak operasional
- SIA untuk mengetahui aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan.
- Kajian FPIC pada masyarakat pemilik ulayat/kampung
- Pengembangan sistem perlindungan dan pengamanan hutan
- Evaluasi program-program sosial per semester pada RKT berjalan
- Penyuluhan/sosialisasi dalam rangka perbaikan dan pengembangan program.

### **2. Lingkungan**

Pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi :

- MONEV RIL
- Pemantauan penanaman, pemeliharaan dan monitoring gangguan pada tanaman yang meliputi spesies invasive dan hama penyakit
- Pemantauan curah hujan
- Pemantauan debit dan kualitas air sungai
- Pemantauan Erosi
- Pemantauan suhu dan kelembaban suhu harian
- Pemantauan Hotspot
- Monitoring dan Pengelolaan Limbah

## **D. Nilai Konservasi Tinggi**

Program pemantauan yang diformulasikan dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan NKT memuat:

- Identifikasi ancaman keberadaan NKT
- Sasaran pengelolaan dan pemantauan
- Metode pengelolaan dan pemantauan
- Periode dan frekuensi kegiatan
- Indikator kegiatan
- Strategi intervensi untuk integrasi dalam rencana operasional unit management
- PIC (Person In Charge) atau personel yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada unit manajemen

## **E. Sistem Pemantauan Berdasarkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

Keterlibatan pemangku kepentingan dimulai saat proses identifikasi dan perencanaan kegiatan program-program pemantauan baik pemantauan aspek lingkungan maupun aspek sosial. Konsultasi dalam program pemantauan melibatkan pakar, instansi litbang, lembaga penelitian, universitas, maupun tokoh masyarakat untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta mendapatkan informasi terkini atau hasil penelitian terbaru sehingga pengolaan adaptif dapat terlaksana.

